

Kinerja Keuangan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Daerah di Indonesia

Khairudin^{1*}, Rosmiati Tarmizi², Indrayenti³, Aminah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Bandar Lampung-Lampung

*Corresponding: khairudin@ubl.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memotret kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah di Indonesia serta membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, dimana kinerja keuangan diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan keuangan daerah sedangkan kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian hipotesis. Hasil penelitian berdasarkan periode pengamatan menemukan bukti bahwa (1) kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah di Indonesia belum begitu baik; (2) kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (3) efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (4) efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan (5) pertumbuhan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini telah mengkonfirmasi stakeholder theory, dimana sebagai sebuah organisasi pemerintah daerah telah memberi manfaat kepada para stakeholder diantaranya adalah berupa kesejahteraan bagi masyarakat meskipun belum sesuai dengan harapan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to capture the financial performance and community welfare in Indonesian local governments and to find empirical evidences on the effect of financial performance towards community welfare. This research was conducted in Indonesian district or city governments where the financial performance is measured through the ratio of local government financial independence, financial effectiveness, financial efficiency, and financial growth and the community welfare is measured through Human Development Index (HDI).

The testing was performed using hypothesis testing. The results of the study, based on the period of observation, found evidences that (1) the financial performance and the community welfare in Indonesian local governments are not so good; (2) the local government financial independence has positive and significant effect on community welfare; (3) the local government financial effectiveness has positive but not significant effect on community welfare; (4) the local government financial efficiency has positive and significant effect on community welfare; and (5) the local government financial growth has negative and significant effect on community welfare. This study confirmed the stakeholder theory, in which local government as an organization has given benefits to the stakeholders in the form of welfare for the community, although it is not yet reaching our expectations.

Keywords: *Financial Performance, Community Welfare.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa seluruh daerah di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khusaini, 2006).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan jika pemerintah daerah memiliki kinerja keuangan yang baik, karena tanpa adanya dukungan dana, maka kegiatan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum dalam rangka merealisasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan dapat berjalan dengan baik. Artinya bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, apabila pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang meningkat juga (Christy dan Adi, 2009).

Namun fakta yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera setiap tahunnya rata-rata meningkat tidak lebih dari 1%, sedangkan realisasi pendapatan daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera rata-rata meningkat lebih dari 10% setiap

tahunnya. Artinya pertumbuhan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (BPS-RI, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah belum cukup efektif untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 114 pemerintah kabupaten dan 32 pemerintah kota di Sumatera sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS-RI) berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berupa Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur melalui rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan keuangan daerah (Halim, 2004) sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (UNDP, 1990). Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Adapun model regresi pada penelitian ini adalah:

$$KM = a + KKD + \text{et.....}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil statistik deskriptif rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan keuangan daerah serta indeks pembangunan manusia pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Std. Deviation	Mean
Rasio Kemandirian	146	2	43	6.35	8.60
Rasio Efektivitas	146	16	195	20.22	96.15
Rasio Efisiensi	146	70	169	12.13	94.95
Rasio Pertumbuhan	146	-35	68	16.40	9.11
IPM	146	57	98	5.49	68.65
Valid N (listwise)	146				

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel statistik deskriptif tersebut menginformasikan bahwa kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah di Indonesia belum begitu baik, dimana nilai mean rasio kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 8,6% (termasuk dalam kriteria penilaian *rendah sekali dengan pola hubungan instruktif*); nilai mean rasio efektivitas keuangan daerah berada diatas nilai 90% (termasuk dalam kriteria

efektif); nilai mean rasio efisiensi keuangan sebesar 96% (berada diatas 60% dan termasuk dalam kriteria kurang efisien) serta nilai mean rasio pertumbuhan keuangan daerah masih rendah karena berada dibawah 10%. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Khairudin dan Aminah (2017) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah di Propinsi Lampung belum begitu baik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2
Pengujian Hipotesis

	Coefficient	t statistic	Sig	Kesimpulan
Kemandirian_Kesejahteraan Masyarakat	.467	7.692	0.000	Terkonfirmasi
Efektivitas_Kesejahteraan Masyarakat	.087	2.347	0.020	Terkonfirmasi
Efisiensi_Kesejahteraan Masyarakat	.022	1.981	0.035	Terkonfirmasi
Pertumbuhan_Kesejahteraan Masyarakat	-.076	-2.781	0.041	Terkonfirmasi

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel pengujian hipotesis menginformasikan bahwa nilai koefisien kemandirian keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah 0,467; t_statistik sebesar 7.692 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 maka hipotesis pertama dapat dikonfirmasi. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Simanjuntak dan Mukhlis (2015); Iskandar dan Subekan (2014); Amalia dan Purbadharmaja (2014) dan Dewi dan Sutrisna (2014) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai signifikan untuk hipotesis kedua sebesar 0,020, sehingga hipotesis kedua juga dapat dikonfirmasi. Temuan ini tentunya mendukung hasil penelitian Iskandar dan Subekan (2014) yang mengungkapkan bahwa efektifitas keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Hipotesis ketiga juga dikonfirmasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien efisiensi keuangan terhadap

kesejahteraan masyarakat adalah 0,022; $t_{\text{statistik}}$ sebesar 1.981 dan nilai signifikansi sebesar 0,035. Sehingga efisiensi keuangan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat terbukti. Temuan ini mendukung penelitian Iskandar dan Subekan (2014) yang menyatakan efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan dengan efisiensi penggunaan dana, maka program-program kerja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat berjalan dengan maksimal. Penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi hipotesis keempat, dimana hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien pertumbuhan keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah -0,076; $t_{\text{statistik}}$ sebesar -2.781 dan nilai signifikansi sebesar 0,041. Hal ini dikarenakan alokasi belanja yang dilakukan pemerintahan daerah masih berfokus pada menghabiskan anggaran bukan berdasarkan *outcome* yang akan dihasilkan, sehingga kesejahteraan masyarakat masih menjadi persoalan.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengkonfirmasi bahwa (1) kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah di Indonesia belum begitu baik (2) kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (3) efektivitas keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (4) efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan (5) pertumbuhan keuangan daerah memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi dari hasil temuan ini adalah pemerintah daerah harus segera meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak; pemerintah daerah harus segera meningkatkan orientasi penggunaan anggaran untuk belanja modal; pemerintah daerah harus segera membuat aturan ketat untuk penggunaan anggaran yang harus fokus pada *outcome* yang dihasilkan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Serta terimakasih juga kami sampaikan kepada BPS-RI dan BPK-RI yang telah membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F.R. dan Purbadharmaja, Ida Bagus Putu. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3, No. 6
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2016. Indonesia Dalam Angka.
- Christy, Fhino Andrea dan Adi, Priyo Hari. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya.
- Dewi, P.A.K dan Sutrisna, I Ketut. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 4, No. 1.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Iskandar, Azwar dan Subekan, Achmat. 2014. Kinerja Keuangan

- Daerah dan Kesejahteraan Rakyat di Era Desentralisasi Fiskal : Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012. *Jurnal STAN Vol. I/XII/2014.*
- Khairudin dan Aminah. 2017. *Analysis of Effectiveness of New Region Expansion in Lampung Province. Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol.6, Issue 3
- Khusaini, Muhammad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE Universitas Brawijaya.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, Imam. 2015. *Empirical Study about The Interaction Between Equalization Funds, Regional Financial and Human Development Index in Regional Economic. International Journal of Economics and Finance*; Vol. 7, No. 1; 2015 ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UNDP. 1990. *Human Development Report 1990*. New York: Oxford University Press.